

DEMOKRASI RADIKAL MENURUT JACQUES RANCIÈRE

SRI INDIYASTUTIK*

Abstrak: Jacques Rancière, pemikir Prancis kelahiran Aljazair (1940-sekarang), konsisten dengan gagasannya tentang kesetaraan bagi setiap orang dan semua orang. Baginya, demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan atau tatanan sosial. Kesetaraan yang kontingen dalam tatanan sosial, menurut Rancière, menjadikan demokrasi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tidak dapat diprediksi. Rancière mengajak kita untuk terbuka pada gangguan-gangguan *demos* dan kemunculan subyek-subyek baru di masa datang sebagai dinamika dalam tatanan sosial yang tidak perlu ditumpas atau dihambat. Politik demokrasi adalah sebuah perselisihan. Namun perselisihan tersebut bukan tindakan revolusi untuk menghancurkan tatanan sosial yang telah ada menjadi tatanan yang sama sekali baru. Demokrasi adalah subyektivasi politik yang mengganggu tatanan sosial dominan yang dilakukan oleh *demos* untuk memverifikasi kesetaraan. Kemunculan *demos* mentransformasi tatanan sosial menjadi bentuk yang berbeda, yang mengakomodasi keberadaan mereka yang tidak terhitung (*the wrong*, yang salah).

Kata-kata kunci: Demokrasi, kesetaraan, *demos*, perselisihan, subyektivikasi, yang salah.

Abstract: Jacques Rancière, a French philosopher born in Algeria (1940-present), affirms the equality of anyone and everyone. He analyzes the so-called democracy not as a kind of state or social order. Equality which is contingent in the social order, for Rancière, shows that democracy could occur everytime and everywhere, democracy could not be predicted. Rancière brings us to have an open eye in front of dispute of the *demos* and the subjectification of any new subjects. This is an inherent and a dynamic of the social order that should not be repressed or stopped. The

* Sri Indiyastutik, Alumna Pascasarjana (S2), Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat. E-mail: sri.indiyastutik@yappika-actionaid.or.id.

democratic politics is a dispute. But the dispute is not an act of revolution to destroy the existing social order to create an entirely new order. Democracy is the political subjectification that disrupts the *police* order by the *demos* to verify the equality of anyone and everyone. The emergence of the *demos* transforms the social order into a different form when this order accommodates the existence of the wrong.

Keywords: Democracy, equality, demos, dispute, subjectification, the wrong.

PENDAHULUAN

Sebutan orang-orang yang terpinggirkan atau termarginalkan barangkali tidak asing bagi kita. Mereka disebut demikian, misalnya, karena ketidakmampuan ekonomi, ketersisihan dari masyarakat dominan karena perbedaan norma yang dianut, tidak punya keahlian yang digunakan untuk menopang hidupnya dalam hal ekonomi maupun sosial, ketidakmampuan terlibat dalam urusan pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat publik, ketidakmampuan membela diri terhadap tekanan kekuasaan negara atau kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu yang memaksakan kehendaknya, kesulitan mengakses pelayanan publik dasar, dll. Mereka terpinggirkan karena ada yang dominan yang membuat tatanan sosial menjadi hirarkis.

Siapa sajakah mereka? Orang-orang yang disebut terpinggirkan di antaranya adalah masyarakat miskin, perempuan, buruh, masyarakat adat, petani, korban kekerasan politik (pelaksanaan kekuasaan negara), etnis tertentu, penghayat kepercayaan tertentu, dll. Orang-orang atau kelompok-kelompok tersebut sering menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari negara, lembaga sosial, media massa, kelompok masyarakat tertentu, juga individu-individu.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk menyokong mereka agar setara dengan masyarakat lainnya, namun mereka terus ada dan bertambah ragamnya. Demikian juga tatanan sosial dominan terus langgeng dan memerlukan upaya keras untuk menggoyahkannya. Sistem demokrasi yang mewacanakan kesetaraan seperti yang dianut dalam

kehidupan negara kita, tampak kedodoran dalam mengatasi status orang-orang yang terpinggirkan ini. Terkait dengan hal ini, pemikiran Jacques Rancière tentang kesetaraan dan politik menarik untuk dibahas. Pemikirannya barangkali berguna untuk berefleksi apakah ada jalan alternatif yang mungkin ditempuh guna mengatasi persoalan kesetaraan bagi mereka yang terpinggirkan dan persoalan hegemoni elit dalam politik demokrasi.

Jacques Rancière adalah seorang pemikir filsafat dari Prancis kelahiran Aljazair (1940 – sekarang). Saat ini ia adalah profesor emeritus filsafat dari Universitas Paris VIII (St. Denis). Ia pernah menjadi murid dan dekat dengan Louis Althusser, seorang pemikir aliran Marxis. Namun hubungannya dengan Althusser memburuk sejak peristiwa demonstrasi mahasiswa dan buruh pada tahun 1968. Rancière kecewa terhadap sikap gurunya yang tidak turut turun ke lapangan bersama para mahasiswa dan buruh dan bahkan sebaliknya mengancam aksi tersebut. Perlawanannya kepada Althusser dan para elit intelektual ia uraikan dalam buku *Althusser's Lesson*¹ yang diterbitkan dalam edisi berbahasa Prancis pada tahun 1974, juga di *The Intellectual and His People* yang merupakan kumpulan artikel yang ia tulis pada 1975-1985 dan baru diterbitkan dalam Bahasa Inggris pada tahun 2012. Menurut Žižek, Rancière ingin melawan sikap elitis para intelektual tersebut dan mengajak orang-orang yang ditempatkan sebagai 'bukan pakar' untuk berbicara bagi dirinya sendiri. Rancière mengawalinya dengan memunculkan gagasan tentang *demos* sebagai agen yang aktif dalam politik di *polis* Yunani. Kemunculan dan keaktifan *demos* yang selama ini tidak pernah dikenali, tidak pernah punya bagian dalam kehidupan *polis* menjadi duduk setara dengan bagian-bagian masyarakat dominan dan para ningrat.

Menurut Rancière, bagaimana tindakan politik dimulai? Dengan kemunculan *demos* sebagai agen yang aktif di antara *polis* Yunani, dengan kemunculan kelompok yang sebelumnya tidak memiliki tempat atau

1 Edisi Bahasa Inggris diterjemahkan oleh Emiliano Battista dan diterbitkan pada tahun 2011.

bagian di dalam kehidupan sosial (istilah yang paling tepat adalah menduduki sebuah tempat) mendesak untuk dilibatkan di dalam ruang publik, untuk didengar secara setara dengan penguasa oligark atau bangsawan.²

Selain kekecewaan kepada sikap elitis para intelektual kampus pada peristiwa kerusuhan 1968, pengalaman Rancière berinteraksi secara intensif dengan para buruh dalam kegiatan penelitiannya, tampak berpengaruh terhadap perhatiannya pada persoalan kesetaraan, emansipasi, dan politik bagi orang-orang yang terpinggirkan dari tatanan sosial dominan.³ Rancière dikenal sebagai pemikir filsafat yang konsisten dengan gagasannya tentang kesetaraan yang ia kembangkan di bidang pendidikan, politik, demokrasi, seni, dan sejarah. Ia belum begitu lama dikenal oleh para pembaca berbahasa Inggris. Misalnya, buku karyanya berjudul *Le Philosophe et ses pauvres (The Philosopher and His Poor)* yang diterbitkan dalam Bahasa Prancis pada tahun 1983, baru diterbitkan dalam Bahasa Inggris pada tahun 2004. Namun demikian, segera setelah buku-bukunya terbit dalam Bahasa Inggris, banyak pemikir yang mengapresiasi gagasannya dan juga memberikan kritik, termasuk di antaranya adalah para pemikir gerakan kiri seperti Todd May dan Saul Newman. Pemikiran Rancière diharapkan dapat menjadi amunisi baru bagi gerakan kiri yang beberapa tahun terakhir ini mengalami kelesuan. Sementara itu, Jean-Philippe Deranty menyebut bahwa pemikiran Rancière mengandung unsur kebaruan tentang etika pengakuan (*the ethic of recognition*) terhadap status 'yang lain' (*the other*) apabila dihadapkan dengan para pemikir kontemporer lainnya.⁴ Rancière sendiri menegaskan bahwa pemikirannya tentang status 'yang lain' adalah untuk membedakan diri kita dengan orang-orang di luar kita. Namun ia menolak

2 Slavoj Žižek, "The Lesson of Rancière," in *Politics of Perception*, ed. Jacques Rancière, London & New York: Continuum, 2004, p. 69. Alleta J. Norval, "Writing a Name in the Sky: Rancière, Cavell, and the Possibility of Egalitarian Inscription" *American Political Science Review* 106 (November 2012): 810-826.

3 Rancière menerbitkan buku *The Night of Labour* yang diterbitkan dalam edisi Bahasa Inggris pada 1991.

4 Jean-Philippe Deranty, "Jacques Rancière's Contribution to the Ethics of Recognition" *Political Theory* 31 (February 2003): 136-156.

adanya hubungan etis yang bersifat transenden antara diri kita dengan 'yang lain.' Ia menolak personifikasi 'yang lain' menjadi 'Yang Lain' (*the Other*).⁵ Posisi pemikiran Rancière yang berbeda ini merupakan wujud konsistensinya dalam menempatkan kesetaraan pada setiap orang dan semua orang.

Tulisan ini akan membahas pokok-pokok pemikiran Rancière tentang kesetaraan, politik, dan demokrasi. Kegelisahan yang mungkin menghinggapi pikiran sebagian pemerhati keberadaan orang-orang yang terpinggirkan di tengah kehidupan masyarakat yang sangat plural di Indonesia, barangkali tidak akan terdamaikan dengan membaca Rancière karena tidak berujung pada solusi yang menenangkan. Namun analisisnya terhadap status mereka yang terpinggirkan dan bagaimana keluar dari situasi tersebut secara radikal, merupakan sumbangan penting bagi autokritik gerakan sosial. Perlu diakui bahwa penerapan pemikiran Rancière di tataran praktis tidaklah mudah. Membaca Rancière sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru agar tidak terpeleset pada tafsir yang terlalu 'kiri.' Seperti halnya pesan Rancière, "Bagi mereka yang ingin merajut sebuah cara baru antara pemikiran konsensual dan pemutlakan secara etis terhadap *the wrong*, masih ada banyak ruang untuk mendiskusikannya."⁶

Untuk menelusur sosok orang-orang terpinggirkan dan statusnya dalam pemikiran Rancière, perlu ditempuh jalan berputar. Diskusi tentang mereka dapat dipahami dari uraian mengenai konsep politik, tatanan sosial (*police*), dan kesetaraan. Namun demikian, untuk mendiskusikan ketiganya, kita perlu terlebih dahulu membahas analisa Rancière terhadap filsafat politik. Dalam hal ini secara khusus membahas hubungan antara filsafat dan politik sebagai obyek kajiannya.

5 Jacques Rancière, "The Thinking Dissensus: Politics and Aesthetics," in *Reading Rancière*, eds. by Paul Bawman dan Richard Stamp, London & New York: Continuum International Publishing, 2011, p. 13.

6 Jacques Rancière, "The Thinking Dissensus: Politics and Aesthetics," in *Reading Rancière*, p. 16.

KESETARAAN PADA SETIAP ORANG DAN SEMUA ORANG

Rancière mengawali pembahasan tentang politik dengan mempertanyakan otoritas filsafat politik dalam melakukan telaah terhadap obyek bahasannya, politik. Di dalam *Disagreement*, Rancière merujuk teks Aristoteles dalam buku *Politics*. Di situ dinyatakan bahwa filsafat politik perlu dipanggil untuk memperjelas pengertian tentang kesetaraan dan ketidaksetaraan dalam perdebatan mengenai keadilan dalam tata kehidupan bersama masyarakat. Perdebatan mengenai kesetaraan dan ketidaksetaraan dianggap sulit ditengahi. Keadilan menyangkut kesetaraan. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana karakter kesetaraan, dan kesetaraan dalam hal apa? Terkait dengan persoalan ini, filsafat politik dianggap dapat mengatasinya dengan menawarkan jalan keluar.⁷ Tepat di titik inilah Rancière mengkritik peran filsafat dalam membangun konsep tentang politik. Aneka argumen yang disajikan oleh filsafat tentang politik sejak klasik hingga kontemporer masih berkuat seputar pembahasan tentang kesetaraan geometris, yaitu tentang tatanan sosial yang terbagi-bagi dan hirarkis.⁸ Sedangkan kesetaraan aritmetis sulit diatasi sehingga filsafat politik dianggap perlu hadir untuk memberikan argumennya tentang politik. Menurut Ann Ward, prinsip kesetaraan aritmetis dan geometris adalah prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Kesetaraan aritmetis adalah pembagian yang setara kepada masing-masing orang dengan asumsi bahwa setiap orang berhak memperoleh bagian yang sama. Sedangkan kesetaraan geometris adalah pembagian kepada masing-masing orang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau kualitas yang dimiliki dan ditunjukkan oleh masing-masing orang. Kesetaraan geometris memandang bahwa secara alamiah masing-masing orang memang tidak setara sehingga adalah adil jika pembagian yang diperoleh juga tidak setara.⁹

7 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999, p. vii. Aristotle, *Politics*. London: William Heinemann LTD, 1967, 1282 b 15 - 21.

8 Akan dibahas pada bagian lain dari tulisan ini.

9 Ann Ward, "Justice as Economics in Aristotle's Nicomachean Ethics." *Canadian Political Science Review* 4 (March 2010): 1-11.

Posisi pemikiran Rancière adalah pada kesetaraan aritmetis. Menurutnya, “kesetaraan aritmetis sederhananya adalah kesetaraan bagi setiap orang dan semua orang: kesimpulan akhirnya adalah ketiadaan *arkhê*, sifat kontingen dari setiap tatanan sosial.”¹⁰ Yang disebut *arkhê* adalah prinsip dasar yang menentukan kualifikasi untuk memerintah, sebuah kualifikasi yang ditentukan sejak permulaan dan ditegaskan kembali bahwa dunia berjalan dengan cara demikian. Prinsip ini menyangkut kualifikasi memerintah atas dasar faktor keturunan, senioritas, keningratan, kekayaan, dan penguasaan pengetahuan.¹¹ Kesetaraan pada setiap orang dan semua orang ini kontingen dalam tatanan sosial dominan. Artinya bahwa kesetaraan bisa terjadi dan bisa juga tidak, ia terjadi secara acak, dan keberadaannya terikat pada struktur yang lebih tetap yaitu tatanan sosial dominan tersebut. Kesetaraan bukan merupakan tujuan akhir yang bersifat tetap. Kesetaraan juga bukan merupakan nilai yang di dalamnya terkandung unsur moral baik atau buruk yang menjadi dasar orang-orang untuk bertindak.¹²

Ide kesetaraan pada setiap orang dan semua orang yang dikemukakan Rancière bertitik tolak dari gagasan tentang kesetaraan akal budi. Dalam hal ini, menurut Rancière tidak ada argumen logis yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya hirarki akal budi antara orang yang satu dan yang lainnya.

Dengan mengatakan bahwa ‘ia lebih pintar,’ berarti kamu menyerahkannya kesimpulan atas gagasan-gagasan yang menceritakan tentang sebuah fakta. Kamu memberinya sebuah nama. Tetapi nama dari fakta tersebut bukanlah penyebab, namun setepat-tepatnya hanyalah sebuah metafora. Pertama-tama kamu menceritakan sebuah fakta bahwa ‘ia berhasil dengan lebih baik.’ Dalam menceritakan ulang fakta tersebut, kamu menyebutnya dengan nama lain, ‘ia lebih pintar.’ Namun

10 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 15.

11 Jacques Rancière, “Against an Ebbing Tide: an Interview with Jacques Rancière,” in *Reading Rancière*, p. 239.

12 Lihat penjelasan tentang tidak adanya landasan etis dalam tindakan politis pada tulisan ini.

tidak ada satupun di pernyataan kedua ada di dalam pernyataan pertama.¹³

Rancière menggunakan ide kesetaraan aritmatik untuk menganalisa berbagai pemikiran filsafat politik, mulai dari Platon hingga pemikir kontemporer. Ia sendiri menterjemahkan politik sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tersisihkan karena ia adalah bagian yang tidak memiliki bagian;

Politik adalah ruang tindakan orang-orang kebanyakan yang selalu berada dalam perselisihan, hubungan antara bagian-bagian yang hanya menjadi bagian dan mereka yang dianggap tidak pernah setara dengan keseluruhan yang punya bagian tersebut. [...] Politik ada melalui gerakan kuat untuk melepaskan diri dari kebiasaan sebuah penilaian bahwa ada bagian yang tidak memiliki bagian dan yang bukan apa-apa. [...] Politik diawali dengan 'yang salah': kesenjangan yang diciptakan oleh orang-orang tidak bebas antara tatanan aritmatik dan tatanan geometris.¹⁴

Di dalam kutipan di atas, terdapat penggalan kalimat "selalu berada dalam perselisihan." Penggalan kalimat ini merupakan salah satu inti pemikiran Rancière tentang politik. Menurut Samuel A. Chambers, politik dalam pemikiran Rancière adalah kekuatan yang bersifat "menggangu (*disruptive*),"¹⁵ yaitu menggangu eksistensi tatanan dominan. Gangguan tersebut berasal dari orang-orang atau jaringan orang-orang yang merupakan bagian dari tatanan sosial namun tidak dilihat atau tidak dianggap atau tidak terhitung sebagai bagian dari tatanan itu. Rancière menyebut orang-orang seperti itu sebagai 'yang salah' (*the wrong*).¹⁶ Namun ia kadang juga menyebut sebagai *demos* atau *people* (orang-orang yang tak terhitung).

13 Jacques Rancière, *The Ignorant School Master*. Terj. Kristin Ross. California: Stanford University Press, 1991, p. 49.

14 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, pp. 14 – 27.

15 Samuel A. Chambers, "The Politics of the Police: from Neoliberalism to Anarchism, and Back in Democracy," in *Reading Rancière: Critical Dissensus*, eds. Paul Bawman & Richard Stamp. London & New York: Continuum International Publishing Group, 2011, p. 32.

16 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, pp. 21-42.

Karakter dasar politik yang berupa perselisihan ini disadari Rancière akan menimbulkan penilaian bahwa politik itu bebas nilai. Salah satu penilaian itu berasal dari Todd May. Dia merumuskan lima kriteria politik demokrasi. Menurut May, Rancière seharusnya memasukkan unsur anti kekerasan dalam konsepnya tentang politik, “politik demokrasi harus bertujuan bukan untuk tindakan kekerasan. Kekerasan mungkin dapat terjadi, namun hal itu karena tidak ada pilihan lain dan ketika penyangkalan terhadap kesetaraan sangat brutal dan kuat.”¹⁷ Menanggapi kritik-kritik semacam ini, Rancière berargumen bahwa dirinya memang menolak untuk meletakkan landasan etis dalam politik yang dipahami oleh umum. Dia justru mempertanyakan pendasaran etis itu. Bencana atau kekacauan mungkin saja terjadi karena tidak adanya pendasaran etis terhadap tindakan politik. Namun Rancière ingin mempertanyakan yang sebaliknya. Bencana yang lebih dahsyat dapat terjadi karena konflik etis, misalnya tindakan pada era George Bush dan Osama bin Laden. Rancière bersikukuh bahwa “politik memiliki universalitasnya sendiri, alat ukurnya sendiri, yaitu kesetaraan.”¹⁸

Rancière menempatkan kesetaraan sebagai pengandaian, artinya “sebuah kondisi yang hanya berfungsi apabila diletakkan dalam tindakan.”¹⁹ Yang dimaksud dengan ‘tindakan’ adalah gangguan yang dilakukan oleh ‘yang salah’ untuk memverifikasi kesetaraan. Gangguan yang mereka lakukan merupakan bentuk tindakan yang disebut politik. Mereka mengganggu tatanan sosial dengan bertitik tolak pada kesadaran bahwa mereka setara dengan bagian-bagian dari tatanan sosial dominan tersebut. Gangguan yang dilakukan oleh ‘yang salah’ atau *demos* atau orang-orang yang tak dihitung (*people*) terhadap tatanan sosial dominan yang eksis tidak mengandung arti baik atau buruk. Hal ini ditegaskan

17 May, Todd, *Contemporary Political Movement and the Thought of Jacques Rancière*, *Contemporary Political Movement and the Thought of Jacques Rancière*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009, p. 22.

18 Jacques Rancière, “The Thinking of Dissensus, Politics and Aesthetics,” p. 4.

19 Jacques Rancière, *Politics of Perception*. Terj. Gabriel Rockhill. London & New York: Continuum, 2004. p. 52.

oleh Rancière bahwa politik bukanlah pelaksanaan kekuasaan.²⁰ Politik sebagai tindakan *demos* mengganggu tatanan sosial dominan bukan berarti menempatkan tatanan sosial tersebut sebagai sistem yang menindas yang melakukan kontrol terhadap kehidupan masyarakat.

Sementara itu, tatanan sosial dominan yang di dalamnya terdapat sistem pembagian dan legitimasi kekuasaan disebut *police*. Termasuk di dalamnya adalah tatanan masyarakat yang menganut dan menerapkan prinsip hirarki (*arkhê*) sebagai dasar legitimasi untuk memerintah. *Police* tidak dapat serta merta disamakan dengan sebuah negara atau kota. Esensi *police* ada pada membagi-bagi atau membuat partisi dalam masyarakat di mana ada hirarki di dalamnya. Mereka dibagi seolah ada tempat atau sekat yang merupakan batas antara suatu kelompok dan kelompok lainnya yang membuat sesuatu terlihat atau tidak terlihat.

Police adalah sebuah tatanan kesatuan-kesatuan yang menentukan bagaimana cara bertindak, cara berada, dan cara berkata-kata, dan cara pembagian tempat dan kerja; ini adalah sebuah tatanan tentang apa yang bisa dilihat dan dikatakan yang melihat bahwa suatu aktivitas terlihat sedangkan aktivitas lainnya tidak terlihat, bahwa berbicara dipahami sebagai diskursus sedangkan yang lain sebagai suara yang gaduh.²¹

Police juga merupakan “pembagian berdasarkan persepsi indra yang prinsipnya adalah tiadanya ruang kosong dan tiadanya suplemen.”²² Tatanan sosial dilihat terdiri dari bagian-bagian, dan selalu ada yang luput dari hitungan karena persepsi indra kita (*perceptive given*)²³ memang melihat dengan cara demikian. Oleh karenanya, Rancière menyebutnya sebagai *le partage du sensible* (atau dalam Bahasa Inggris: *the distribution of the sensible*, atau kadang *the partition of the sensible*). Selanjutnya, penulis menterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai

20 Jacques Rancière, *Dissensus on Politics and Aesthetics*. Terj. Steven Corcoran. London & New York: Continuum International Publishing Group, 2010, p. 27.

21 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 29.

22 Jacques Rancière, *Dissensus on Politics and Aesthetics*, p. 36.

23 Jacques Rancière, *The Thinking of Dissensus, Politics and Aesthetics*, p. 28.

tatanan sosial dominan. Dalam hal ini, Rancière tidak mau terjebak pada cara pandang yang membagi-bagi tersebut.

Menurut Rancière, politik terjadi di dalam *police*. Politik terjadi di dalam hubungan-hubungan dengan bagian-bagian dari tatanan *police*. Kita hidup di dalam *police*. Kita hidup di dalam apa yang disebut oligarki, “tidak ada kehidupan politis, melainkan sebuah panggung politis.”²⁴ Politik, tindakan yang dilakukan oleh *demos* memutuskan dan menyambung hubungan-hubungan di antara bagian-bagian dalam tatanan sosial dominan yang dilihat seperti tersekat-sekat oleh tempat dan peran-peran para penghuninya. Politik merupakan simpul (*nexus/node*)²⁵ yang menghubungkan bagian-bagian tersebut. Ketika *demos* memunculkan dirinya sebagai suplemen di antara tatanan sosial dominan, maka tatanan tersebut bertransformasi menjadi tatanan baru dan politik pun berakhir. Situasi ini oleh Rancière disebut pasca demokrasi.

Pasca demokrasi adalah praktik pemerintah dan legitimasi konsep-tual untuk demokrasi setelah kemunculan *demos*, sebuah bentuk demokrasi yang menghilangkan mereka yang tidak dihitung, dan perselisihan orang-orang dan dengan demikian dapat direduksi menjadi sekedar interaksi antara mekanisme negara dan kombinasi-kombinasi energi sosial dan kepentingan.²⁶

Politik yang dilakukan oleh *demos* untuk memverifikasi kesetaraan bukanlah untuk menentang tatanan sosial dominan, bukan untuk menghancurkannya dan menggantinya dengan tatanan baru. Tatanan sosial dominan tidak dimaknasi sebagai tindakan mengontrol atau menindas, namun sebagai pembagian-pembagian. Demikian juga *demos* yang melakukan tindakan politik tidak dapat disebut sebagai perusuh. Rancière

24 Jacques Rancière, *The Thinking of Dissensus, Politics and Aesthetics*, p. 4.

25 Slavoj Žižek, “A Leftist Plea for ‘Eurocentrism,’” *Critical Inquiry* 24 (1998), pp. 988-1009. Di sini Žižek mengatakan bahwa hubungan dalam pemikiran Rancière, politik dan demokrasi itu sama. Hubungan antara *police* dan politik bukan dua hal yang saling berhadapan, namun saling berkaitan sehingga menjadi tidak begitu tegas perbedaannya. Pendapat ini mendukung tafsir Samuel A. Chambers tentang hubungan *police* dan politik (lihat Bab IV).

26 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 102.

berpendapat bahwa daripada mendekonstruksi sekat-sekat itu, menurutnya ia lebih cenderung mengaburkannya. Politik menurutnya terjadi di dalam arena yang ia sebut sebagai *le politique*²⁷ (dalam Bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *the political* — yang politis). Perselisihan terjadi di arena ini, di dalam tatanan sosial dominan itu sendiri karena kesetaraan yang diverifikasi, yang ditemukan oleh *demos*, kontingen di dalam tatanan tersebut. Penemuan kesetaraan tidak menetap dalam diri *demos* ataupun pada komunitas/keompok. Kesetaraan yang terjadi bersifat sementara atau sesaat. Politik bukanlah *progress* yang beriringan dengan keberlanjutan ekonomi dan pembangunan sosial, juga bukan tujuan akhir yang sudah dirancang.²⁸

Jadi menurut Rancière, “demokrasi bukanlah sebuah rezim tentang cara hidup sosial. Demokrasi adalah lembaga politik itu sendiri, sistem tentang bentuk-bentuk subyektivasi dimana pembagian kesatuan-kesatuan menjadi fungsi sesuai dengan sifat dan tempatnya diabaikan, dikembalikan pada kontingensinya oleh demokrasi.”²⁹

JALAN BUNTU FILSAFAT POLITIK DALAM MENGATASI KESETARAAN ARITMATIS

Lewat analisa berbagai pemikiran filsafat tentang politik, Rancière berkesimpulan bahwa filsafat selama ini menempatkan politik sebagai batu sandungan (skandal) yang sulit diatasi. Filsafat justru menyembunyikan skandal politik untuk menutupi kebuntuan pengertian maupun praktik politik. Politik dianggap buntu karena politik, secara definisi maupun praktiknya, merupakan situasi perselisihan yang menempatkan kesetaraan pada setiap orang dan semua orang sebagai pengandaian serta diverifikasi untuk menemukan keberadaannya melalui gangguan terhadap tatanan sosial dominan. Oleh karenanya politik dapat mem-

27 Jacques Rancière, *Politics of Perception*, p. 90. Rancière, *The Thinking of Dissensus, Politics and Aesthetics*, p. 5. Rancière, *Moments Politiques*. Terj. Mary Foster. New York: Seven Stories Press, 2014, pp. 41-42.

28 Jacques Rancière, *The Thinking of Dissensus: Politics and Philosophy*, p. 5.

29 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 101.

bawa kekacauan tatanan masyarakat, mempersoalkan dan mengganggu segala sesuatu yang dianggap sebagai prinsip utama, kodrat alam, dan aturan ilahiah. Karakter dasar politik adalah tidak menjanjikan hasil akhir berupa kesepakatan dan harmoni dalam tatanan sosial. Karakter politik yang demikian, sulit ditangani atau sulit dikelola sehingga memicu filsafat untuk menjadikan politik sebagai obyek kajiannya. Dalam hal ini, filsafat menempatkan dirinya sebagai politik itu sendiri dengan menekan karakter dasar politik sehingga politik dapat ditangani, situasi hubungan sosial menjadi harmonis karena perselisihan ditekan kemunculannya sehingga kehidupan bersama yang minim pertentangan dapat tercipta.

Filsafat tidak datang untuk menjadi penyelamat siapa saja, dan tidak ada seorang pun yang memintanya untuk melakukannya, bahkan ketika tata aturan sopan santun masyarakat telah memiliki kebiasaan di mana para politisi, pengacara, dokter atau kesatuan-kesatuan lainnya berkumpul untuk berefleksi, sementara itu filsuf sebagai ahli khusus dalam berpikir umum. Jika ajakan itu untuk menghasilkan buah pemikiran intelektual, maka pertemuan tersebut harus mengidentifikasi titik-titik ketidaksepakatan [...] Kebuntuan politik memicu politik menjadi obyek filosofis [...] filsafat menempatkan dirinya sebagai politik itu sendiri, untuk menekan skandal dalam berpikir yang pas untuk menguji coba politik. [...] Dasar perselisihan filsafat dengan politik adalah reduksi rasionalitas ketidaksepakatan.³⁰

Kesulitan mengatasi politik ditemukan mulai dari pemikiran Platon hingga para pemikir kontemporer. Mereka belum beranjak dari kesulitan tersebut. Gagasan-gagasan yang muncul untuk mengatasi kesetaraan justru membuat kesetaraan sebagai skandal yang disembunyikan. Rancière menyajikan model konflik antara filsafat dan politik, yaitu *archipolitics*, *parapolitics*, dan *metapolitics*. Rancière mengawali analisisnya dari pemikiran Platon, *archipolitics*. Ia memilih Platon karena karya-karyanya paling rinci dalam menyajikan perdebatan mengenai konsep politik, *police*, kesetaraan, dan ketidaksetaraan dalam tatanan sosial. Dari Platon, Rancière mengidentifikasi *arkhê* menjadi prinsip utama penopang tata-

30 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, pp. x - xii.

nan masyarakat. Prinsip utama yang ia identifikasi di antaranya adalah: pertama; konsep hirarki tatanan masyarakat, yaitu filsuf, tentara, pedagang dan pengrajin. Khusus untuk pengrajin, mereka tidak memiliki waktu luang karena, misalnya, sibuk membuat sepatu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang. Tidak hanya persoalan jumlah, namun juga perlu memperhatikan kualitas sehingga waktu sangat terbatas agar dapat menjadi spesialis atau ahli di bidang itu. Oleh karenanya mereka tidak punya waktu luang untuk terlibat dalam urusan lain selain urusannya, termasuk untuk terlibat di pertemuan-pertemuan untuk turut menentukan kehidupan kota. Menurut Rancière, proyek republikan Platon melakukan psikologisasi (*psychologizing*)³¹ dan sosiologisasi (*sociologizing*)³² seluruh elemen masyarakat dengan memahami bahwa peran, kodrat, dan rasa merasa mereka adalah bagian dari tubuh masyarakat secara keseluruhan. Intinya menanamkan semangat pada semua tingkatan masyarakat agar mereka berada di tempatnya dan menerima secara sukarela tentang pembagian peran tersebut merupakan bentuk kebijaksanaan. Dan semangat itu menjadi semacam aturan agar kehidupan kota dapat berjalan, “keadilan adalah kebijaksanaan yang mengatur negara, keberanian menginspirasi tentara, dan *sôphrosunē*³³ memerintah para pengrajin.”³⁴

31 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 69.

32 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 69. Sosiologisasi yang dimaksud oleh Rancière adalah pembagi-bagian tatanan sosial dominan.

33 A. Setyo Wibowo, *Xarmides, Platon: Keugaharian* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), pp. 3-14. Definisi ini merujuk pada tafsir yang dibuat oleh A. Setyo Wibowo terhadap buku yang berjudul *Xarmides* yang berisi dialog yang ditulis Platon pada masa muda. Di dalam tafsir tersebut, pengertian *sôphrosune* dapat dirangkum sebagai berikut: 1) “*Sôphrosune* dekat dengan kebijakan praktis sehingga seseorang menjadi tahu batas” (hlm. 8); 2) merujuk pada tafsir Louis-André Dorion, *sôphrosune* diterjemahkan sebagai kebijakan bukan dalam arti teoritis namun praktis, yaitu layak diterjemahkan sebagai *moderatio* atau *temperatia*, sebuah kemampuan memoderasi, menghaluskan, menengahi, mengambil batas tengah (hlm. 9); 3) memiliki keutamaan yang dilandasi oleh sebuah hikmat (kebijaksanaan praktis) (hlm. 10); 4) *sôphrosune* yang merangkumi unsur moral (tahu batas) dan unsur intelektual bisa dengan mudah diterjemahkan sebagai *mawas diri* (hlm. 10), ngerti *isin* (tahu malu) (hlm. 11), tahu sopan santun, tahu situasi. Setyo Wibowo selanjutnya menterjemahkan dan menafsirkan istilah *sôphrosune* sebagai keugaharian (hlm. 14). Adapun prinsip keugaharian yang dimaksud Rancière tampaknya sesuai dengan pendapat Kritias, yaitu melakukan urusannya sendiri (lihat hlm. 94-97).

34 Jacques Rancière, *The Philosopher and His Poor*. Terj. John Drury, Corinne Oster, dan

Kedua, kriteria kelayakan untuk memerintah karena faktor keturunan, kenengratan, kekayaan, dan pengetahuan. Rancière merujuk Buku III, *Laws*,³⁵ yang memuat tujuh daftar kriteria kelayakan untuk memerintah. Secara ringkas, kriteria tersebut menyangkut faktor alamiah, penguasaan pengetahuan, dan undian karena pilihan Tuhan.

Rancière juga mengidentifikasi bahwa di dalam karya-karya Platon, ada beberapa mitos tentang berlakunya kesetaraan aritmatik. Namun mitos tersebut dipupus karena dinilai tidak mungkin terjadi atau berlanjut. Misalnya, pertama, kehidupan pada masa Kronos.³⁶ Pada awal kehidupan manusia di bawah pemerintahan Kronos, semua orang setara, alam menyediakan sumber daya yang cukup, semua orang menjalankan tugasnya, tidak ada hubungan antara orang tua dan anak.³⁷

Andrew Parker. London: Duke University Press, 2004, p. 25. Lih. Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 67.

35 Platon, *Laws*, Buku III, terj. R. G. Bury, Litt. D., London & Massachusetts: William Heinemann LTD, Harvard University Press, 1967, 689b; 690: b, c, d, e; 691: b, c, d. Dialog antara seorang dari Athena (Platon), Klinias, dan Megillus membahas tujuh kriteria orang-orang yang tepat dan layak untuk menjadi pemimpin masyarakat dengan urutan sebagai berikut: 1. Orang tua (ayah dan ibu) memimpin anak-anaknya, 2. Orang yang mulia memimpin yang hina, 3. Orang lebih tua memimpin yang lebih muda, 4. Majikan memimpin budak, 5. Orang yang kuat memimpin yang lemah, 6. Orang yang bijak memimpin orang yang tidak memiliki pemahaman (terkait dengan penguasaan pengetahuan), 7. Orang yang berkarakter surgawi dan beruntung dalam undian untuk memimpin orang banyak. Orang-orang muda yang karena kemudaannya kurang bertanggung jawab serta orang-orang yang tidak tahu (*ignorants*) akan berbahaya bagi keberlangsungan tata aturan yang telah dibuat berdasarkan pertimbangan alamiah dan aturan ilahi. Mereka akan menimbulkan kekacauan tata aturan dan bahkan kebencian dari orang-orang terdekatnya. Tata aturan masyarakat telah dibuat oleh orang-orang secara alamiah memiliki prinsip-prinsip untuk memerintah (*knowledge, opinion, reason*) sehingga apabila bagian yang *ignorant* tersebut melawan prinsip-prinsip ini maka itu adalah tindakan yang bodoh.

36 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 16.

37 Plato, *The Statesman*. Terj. Harold Fowler & Lamb. London & Massachusetts; William Heinemann LTD, Harvard University Press, 1962, 271e. Kehidupan di masa Kronos adalah situasi asali di mana kesetaraan pada setiap orang dan semua orang. Diceritakan bahwa kehidupan pada masa Kronos merupakan kehidupan yang spontan baru dibekuk oleh yang ilahi. Yang ilahi menjadi penggembala keseluruhan kehidupan. Buah-buahan dan makanan disediakan untuk manusia secara berlimpah. Masing-masing manusia menjadi penjaga kehidupan dunia, tidak ada makhluk yang liar, tidak ada saling memakan satu dengan yang lainnya, tidak ada perang. Di bawah penguasaan sang penggembala (yang ilahi) tersebut tidak ada negara, tidak ada keluarga, tidak ada laki-laki yang memiliki istri atau anak. Dengan kata lain, setiap orang setara kedudukannya.

Kedua, kriteria ketujuh dari daftar kelayakan untuk memerintah, yaitu berdasarkan undian yang merupakan pilihan Tuhan. Jika pemimpin dipilih melalui proses undian, maka tidak ada landasan kualifikasi apapun untuk memerintah. Dengan kata lain tidak ada *arkhê* yang menjadi dasar untuk memerintah. Ketiga, mitos asal muasal manusia dari tanah dengan kandungan logam yang berbeda-beda. Kandungan logam ini juga menerapkan prinsip undian di mana tidak ada dasar apapun yang menentukan orang yang satu akan mengandung emas dan orang yang lainnya mengandung besi. Artinya kualitas seseorang ditentukan oleh kemungkinan seperti terjadi dalam undian.

Analisa kedua dari Rancière tentang kebuntuan filsafat politik adalah kesetaraan dalam tatanan masyarakat tiruan. Rancière menyebutnya sebagai model *parapolitics*. Ia mengambil inspirasi dari pemikiran Aristoteles tentang kehidupan bersama yang baik. Rancière mengangkat konsep tatanan sosial yang berupaya melibatkan 'yang salah' dalam mempraktikkan kepemimpinan di masyarakat. Kebijakan sebuah kota memberi ruang yang setara bagi 'yang salah' maupun yang dominan untuk bersaing merebut kesempatan menduduki kekuasaan atau memimpin. Rancière menyebut ruang persaingan tersebut sebagai 'politik,' yaitu sebuah arena persaingan yang disediakan secara formal oleh hukum kota namun hanya sekedar formalitas karena pada praktiknya persaingan antara yang dominan dan 'yang salah' tidak sampai terjadi. Kedua belah pihak, dalam hal ini yang dominan dan 'yang salah,' sebenarnya tetap berada di tempatnya masing-masing. Rancière menyebutnya sebagai rezim yang baik karena memberi ruang kemunculan kelompok kaya dan miskin (*demos*), "rezim yang baik adalah yang memberi ruang kemunculan oligarki untuk oligark dan demokrasi untuk *demos*. Jadi partai orang-orang kaya dan partai orang-orang miskin akan dibawa untuk berinteraksi dalam 'politik' yang sama."³⁸

'Yang salah' dalam konsep tersebut adalah mereka yang berada di wilayah-wilayah pertanian yang jauh dari kota tempat terjadinya per-

38 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 74.

saingan menduduki kekuasaan. Mereka juga kelompok yang sibuk dengan pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak ada waktu untuk terlibat dalam arena 'politik.' Sementara itu, kelompok-kelompok dominan telah memiliki sumber daya, waktu, dan berada di pusat-pusat kota tempat terjadinya arena perebutan kekuasaan tersebut. Dengan demikian, hanya mereka yang berada di kelompok dominanlah yang memiliki kesempatan menduduki kekuasaan. Dengan kata lain, ide kehidupan bersama yang memberi ruang yang setara bagi yang dominan maupun 'yang salah' hanyalah bentuk tatanan masyarakat tiruan yang seolah-olah mengakomodir kesetaraan. Ruang tersebut hanya ada di dalam aturan formal sebuah kota saja namun tidak mungkin terjadi. Rancière menyebut ide tatanan masyarakat tersebut sebagai *parapolitics*. Kelompok dominan tetaplah menjadi dominan dan 'yang salah' tetaplah berada di tempatnya, tidak ada perubahan. Penyatuan *demos* dengan mereka yang menduduki tatanan dominan menurut Rancière, "hanya mencapai kesempurnaan dalam bentuk *mise en absence*, sebuah kehadiran yang menarik diri."³⁹ Disebut sebagai kehadiran yang menarik diri karena *demos* yang merupakan struktur demokrasi sebenarnya tidak hadir untuk merebut dan melaksanakan kekuasaannya.

Ide tatanan masyarakat tiruan tersebut semakin radikal dengan munculnya ide kedaulatan individu yang setara pada setiap orang. Rancière merujuk pemikiran Hobbes tentang kehidupan masyarakat pada kondisi alami. Masing-masing individu memiliki naluri mempertahankan diri dari kemungkinan serangan dari individu lainnya. Dari sini muncul gagasan kontrak sosial antar individu untuk membentuk negara. Negara diberi kuasa besar untuk mengatur kehidupan individu agar tidak terjadi perang semua melawan semua. Negara menjamin hak alamiah setiap individu untuk melindungi diri.⁴⁰ Dalam hal ini ide kesetaraan berada di bawah kekuasaan absolut negara yang berhak

39 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 74.

40 Jonathan Wolff, *An Introduction to Political Philosophy*. New York: Oxford University Press, 2009, pp. 8 - 13.

mengatur seluruh individu di masyarakat. Dalam situasi ini, rezim kontrak sosial melindungi hak alamiah individu untuk mempertahankan diri di mana hak tersebut setara pada setiap individu dan semua individu. Namun tindakan tersebut dilakukan dengan menekan munculnya kesetaraan karena negara memiliki hak absolut untuk mengatur masyarakat hingga ke tingkat individu-individunya. Negara menjadi yang superior, dan individu-individu menjadi yang diatur.

Pada Aristoteles tidak dikenal konsep hak sebagai prinsip keadaban masyarakat, melainkan adil (*just*). Oleh karenanya pada *parapolitics* modern, tidak ada lagi konsep 'bagian yang tidak punya bagian' seperti yang digunakan dalam pemikiran Platon maupun Aristoteles. Jadi, hanya ada "individu-individu dan kekuasaan negara. [...] mitos tentang kondisi asali [...] membuat hubungan penuh pertengkaran antar bagian-bagian lenyap."⁴¹ Menurut Rancière, situasi ini membelokkan politik karena ketiadaan gerakan bersama yang terorganisasi yang dilakukan oleh bagian-bagian masyarakat yang tidak memiliki bagian dalam tatanan dominan (*demos*). Ide kehidupan bersama yang baik dengan memberi ruang yang setara untuk persaingan antara kelompok dominan dan 'yang salah' maupun ide kontrak sosial, menurut Rancière keduanya merupakan bentuk *archipolitics* baru.

Analisa ketiga dari Rancière tentang kebuntuan filsafat politik adalah kesetaraan sebagai tujuan akhir. Rancière mengambil contoh perjuangan kelas Marx yang selanjutnya ia kategorikan sebagai *metapolitics*. Rancière menyebut perjuangan kelas untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas di masa depan sebagai mengevakuasi "politik." Politik dalam *metapolitics* adalah politik yang mewacanakan keadilan dan kesetaraan. Dalam hal ini politik melakukan kebohongan karena tidak ada keadilan dan kesetaraan bagi mereka yang tidak memiliki modal dan hanya menjadi pekerja. Mereka hanya diidentikkan dengan manusia yang tidak punya properti, bukan bagian dari tatanan sosial. Evakuasi politik bertujuan memunculkan mereka 'yang palsu' menjadi 'yang benar.' Tujuan akhir

41 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, pp. 77-70.

evakuasi politik adalah masyarakat tanpa kelas di mana masyarakat hanya terdiri dari 'yang benar.' Kondisi ini menghasilkan kebebasan absolut. Rancière juga menyebutnya sebagai kebebasan yang kosong karena kebebasan itu tidak terhubung dengan sistem apapun. Perlawanan oleh 'yang palsu' menghancurkan segala bentuk politik, Rancière menyebutnya sebagai "surplus yang menunjukkan salah satu dari 'kebenaran' politik."⁴² Surplus tersebut merupakan gambaran yang menunjukkan kebohongan politik. 'Yang palsu' muncul sebagai 'yang benar' yang selama ini disembunyikan oleh politik yang mewacanakan keadilan dan kesetaraan.

Rancière mengatakan bahwa Marx sangat jenius karena menempatkan kebenaran 'yang palsu' sebagai 'ideologi.' Ideologi di sini berbeda dengan pengertian idea klasik.

Ideologi adalah sebuah kata yang menunjukkan tanda-tanda yang lengkap tentang sebuah status kebenaran yang didorong oleh *metapolitics*: kebenaran tentang kebenaran 'yang palsu'. [...] kebenaran yang menunjukkan bahwa 'yang palsu' itu sendiri adalah sebuah penanda, kebenaran yang tidak lain adalah menonjolkan 'kesalahan,' kebenaran sebagai gangguan universal [...] sebuah rezim kebenaran yang tak didengar dan merupakan bentuk hubungan baru antara kebenaran dan politik.⁴³

Di sini ada dua persoalan kesetaraan dalam *metapolitics*. Pertama, evakuasi politik memiliki tujuan akhir mewujudkan kesetaraan. Tujuan tersebut ingin dicapai di masa datang. Artinya, kesetaraan tidak terjadi saat ini. Oleh karenanya saat ini hingga waktu masa depan, yang tidak dapat diketahui kapan tepatnya, tatanan sosial tetap didominasi oleh para pemilik properti. Kedua, selama tujuan akhir masyarakat tanpa kelas belum tercapai, maka posisi kelas pekerja adalah inferior daripada para pemilik properti karena politik yang mewacanakan kesetaraan dan keadilan dalam *metapolitics* ditempatkan sebagai kebohongan.

42 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 81.

43 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 85.

Selain ketiga model tersebut di atas, ada analisa keempat dari Rancière tentang kebuntuan filsafat politik, yaitu kesetaraan tidak akan pernah terjadi. Rancière mengangkat pemikiran Derrida untuk menunjukkan gagasan mengenai demokrasi yang tidak pernah akan terjadi. Demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan demokrasi liberal saat ini yang mengatur tatanan masyarakat. Tatanan masyarakat dalam demokrasi liberal di satu sisi menjalankan roda pemerintahan, namun di sisi lain juga terbuka pada kemungkinan aneka bentuk 'Yang Lain' (*the Other*).⁴⁴ Dalam hal ini *demos* sebagai bagian dari yang disebut 'Yang Lain' ditempatkan sebagai hantu yang dipercaya ada dan mengawasi kita. Rancière menyebut bahwa *demos* dijadikan sebagai khayalan saja. Oleh karenanya kesetaraan pada setiap orang dan semua orang tidak akan pernah terjadi.

Analisa kelima dari Rancière tentang kebuntuan filsafat politik adalah mengagungkan 'yang salah' namun sebenarnya mempersempit kemunculannya.⁴⁵ Rancière mengangkat demokrasi konsensus. Menurut Rancière, demokrasi konsensus:

Bukanlah semata-mata merujuk pada semacam untuk diskusi dan/atau kedamaian sosial dan politik. [...] Konsensus merujuk pada wilayah persepsi pada umumnya, singkatnya apa yang telah saya sebut sebagai partisi indrawi, bahkan sebelum menjadi musyawarah. [...] intinya adalah penegasan tentang prasyarat yang menentukan pilihan politis sebagai obyektif dan univokal. [...] Konsensus yang ideal menegaskan bahwa apa yang penting dalam sebuah kehidupan bersama tergantung pada kesetimbangan obyektif di mana kita semua menuju ke arah itu.⁴⁶

Di dalam *Disagreement*, Rancière menyebut demokrasi konsensus sebagai sebuah kondisi pasca demokrasi, yaitu kondisi setelah terjadinya subyektivasi *demos* di mana *demos* berhasil menjadi suplemen dalam tatanan sosial dominan. Dengan kata lain, *demos* yang melakukan

44 Jacques Rancière, *The Thinking of Dissensus*, pp. 12-14.

45 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 107

46 Jacques Rancière, "Dissenting Words, A Conversation with Jacques Rancière." *Diacritics* 30.2 (2000): 123.

tindakan politik berupa perselisihan antara logika politik dan logika *police*, selanjutnya menjadi bagian dari tatanan sosial dominan. Istilah pasca demokrasi digunakan Rancière bukan untuk menunjuk sebuah era pasca modern. Menurut Rancière,

Pasca demokrasi adalah praktik pemerintahan dan legitimasi konseptual untuk demokrasi setelah kemunculan *demos*, sebuah bentuk demokrasi yang menghilangkan mereka yang tidak dihitung, dan perselisihan orang-orang dan dengan demikian dapat direduksi menjadi sekedar interaksi antara mekanisme negara dan kombinasi-kombinasi energi sosial dan kepentingan.⁴⁷

Situasi masyarakat kontemporer saat ini ditandai dengan aneka bentuk simulasi kehidupan masyarakat dalam ruang-ruang maya di internet maupun televisi. Pertunjukan kehidupan di televisi dan efek viral informasi yang disokong oleh teknologi komunikasi membuat kita sulit menemukan mana yang asli dan mana yang simulasi. Situasi ini berjalan bersama dengan rezim opini yang ingin mengangkat 'yang nyata' (*the real*) dengan menangkap kecenderungan pendapat sebagian orang atau kelompok yang dianggap mewakili keseluruhan kelompok masyarakat tertentu atau bahkan keseluruhan masyarakat. Rezim opini disokong oleh jajak pendapat (*polling*) yang dilakukan oleh para pakar ilmu sosial.

Rezim opini seolah-olah dapat menampilkan 'yang salah' untuk muncul dalam tatanan sosial kontemporer secara setara dengan yang lain. 'Yang salah' dalam konteks ini diagungkan atau diberi tempat terhormat untuk muncul dalam tatanan dominan. Namun opini tersebut sebenarnya tidak dapat mewakili keseluruhan mereka yang ditempatkan sebagai 'yang salah' karena mereka sangat beragam. Sementara itu opini dari hasil jajak pendapat menjadi alat legitimasi untuk mengambil atau mempengaruhi keputusan yang dilakukan oleh kelompok dominan dengan mengatasnamakan 'yang salah.' Ilmu-ilmu sosial selanjutnya membuat simulasi untuk mengakomodasi 'yang salah' dalam tatanan

47 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 102.

sosial dan menjadi legitimasi untuk melaksanakan simulasi tersebut dalam kehidupan nyata. Teknologi informasi menyokong upaya tersebut dan menjadikan lingkaran dominasi berlanjut lebih radikal daripada ide-ide sebelumnya. Rezim simulasi membuat segala sesuatu menjadi tampak sehingga tidak ada lagi tempat untuk memunculkan penampakan.⁴⁸ Namun yang tampak tersebut sebenarnya sulit diketahui mana penampakan yang nyata dan yang simulasi sehingga 'yang salah' tetap tidak dikenali dan bahkan semakin sempit ruang bagi mereka untuk memunculkan dirinya dalam tatanan sosial dominan kontemporer. Jejak *archipolitics* kembali muncul dalam perkawinan dua rezim tersebut, yaitu justifikasi opini publik yang dihasilkan oleh pengetahuan obyektif dan simulasi, "penegasan dari pemberian yang obyektif yang ditangani oleh kekuatan para ahli adalah persis sebagai bentuk penyangkalan terhadap 'yang politis;' ini menegaskan tentang apa yang telah saya kemukakan sebagai *police*."⁴⁹

Pengagungan terhadap 'yang salah' juga dilakukan rezim konsensus. Ide dasarnya adalah pendapat yang dominan maupun 'yang salah' berusaha diakomodasi dalam sebuah forum komunikasi. Perbedaan yang terjadi dan berujung pada ketidaksepakatan berusaha dijembatani dengan seolah-olah mengakomodasi semua pendapat. Kesepakatan yang dihasilkan dari rezim konsensus adalah kesepakatan di antara mereka yang dominan karena kepemilikan pengetahuan dan pengaruh. Tidak ada politik dalam rezim konsensus karena ketidaksepakatan seolah-olah diperbincangkan namun sebenarnya ditekan. Menurut Rancière, politik selalu berupa perselisihan antara pihak-pihak yang saling berbicara. Sebuah diskusi bukanlah permainan bahasa, bukan pula penyederhanaan sesuatu ke dalam homonimi⁵⁰ yang dapat dipahami maknanya ber-

48 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 103

49 Jacques Rancière, "Dissenting Words, A Conversation with Jacques Rancière" *Diacritics* 30.2 (2000): 124. Rancière menegaskan bahwa penggunaan istilah 'kekuatan para ahli' tersebut bukan berarti sebagai kontrol terhadap kehidupan seperti teori Foucault, melainkan merujuk pada partisi indrawi tatanan sosial dominan yang esensinya adalah mem-bagi-bagi masyarakat di mana selalu ada bagian yang tidak memperoleh bagian.

50 Alberto Toscano, "Anti-Sociology and Its Limits," in *Reading Rancière*, London:

beda-beda walaupun hal yang dirujuk sama. Masing-masing pembicara memiliki dan menggunakan caranya sendiri untuk mengungkapkan apa yang diketahuinya. Tidak ada bahasa tunggal yang dapat digunakan, misalnya bahasa ilmu pengetahuan yang mendominasi para pembicara dan menggiring para mereka untuk bersepakat terhadap suatu hal. Oleh karenanya yang terjadi adalah praktik ketidaksetaraan. Menurut Rancière, kesepakatan atau konsensus tidak pernah terjadi karena pengetahuan masing-masing pembicara adalah sesuatu yang “puitis”⁵¹ yang melampaui hirarki tahu dan tidak tahu. Bahasa yang digunakan adalah metafora, simbol, narasi, dan deskripsi.

Ide tentang pengetahuan yang puitis menjadi argumen Rancière bahwa konsensus tidak mungkin terjadi karena kesepakatan adalah milik dan dibuat oleh yang dominan yang menyatakan lebih tahu dan memiliki kuasa untuk menggiring semua pembicara yang seolah-olah sepakat. Dalam hal ini, pembicara yang tidak sepakat ibaratnya seperti bukan manusia yang hanya memiliki suara (*phone*) untuk mengindikasikan rasa sakit atau senang. Mereka tidak ditempatkan sebagai orang-orang yang berbicara (*speech*),⁵² di mana berbicara merupakan ekspresi kepemilikan intelektual yang setara pada setiap orang dan semua orang. Beberapa argumen tersebut menunjukkan bahwa ide kesetaraan dalam demokrasi konsensus merupakan kesetaraan geometris yang seolah-olah memberikan ruang kepada *demos* untuk memverifikasi kesetaraan aritmetis.

Analisa keenam dari Rancière tentang kebuntuan filsafat politik adalah menempatkan politik demokrasi sebagai *police*. Demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan, dalam hal ini demokrasi liberal. Konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat diterjemahkan menjadi perwakilan dan bentuk hirarki kewenangan lainnya untuk mengatur dan melayani warga negara serta menjalankan tatanan negara. Hirarki bukan hanya terjadi di tingkat tatanan pemerintahan

Continuum, 2011, p. 224.

51 Jacques Rancière, “The Thinking of Dissensus,” p. 15

52 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 29.

namun juga terjadi di tingkat masyarakat dalam hubungannya dengan negara. Dalam penjelasannya mengenai *parapolitics* modern yaitu konsep negara yang dibangun dari asumsi kondisi asali dan kontrak sosial, ada individu yang memiliki kedaulatan penuh dan ada warga negara. Di antara keduanya ada kesenjangan karena tidak semua individu sekaligus menjadi warga negara. Selalu ada individu-individu yang luput dihitung sebagai warga negara. Selanjutnya, hubungan antara warga negara dan negara adalah kepatuhan menjalankan aturan-aturan negara agar hidup bersama dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kepatuhan merupakan bentuk *archipolitics* baru. Hukum menjadi teror untuk dipatuhi oleh warga negara. Jika melanggar, maka ada hukuman yang akan dikenakan oleh negara, "teror adalah sebuah tindakan politis yang meyakini bahwa tugas politisnya adalah pemenuhan syarat-syarat untuk mencapai sebuah *arkhê* komunitas, teror adalah internalisasi dan promosi atas kesadaran total tentangnya."⁵³ Rancière menempatkan demokrasi seperti ini sebagai *police*. Tidak ada kesetaraan aritmetis dalam demokrasi yang dimaknai sebagai pemerintahan demokrasi liberal, melainkan hirarki dan dominasi.

Ringkasnya, enam hasil identifikasi dari analisa pemikiran Rancière tentang kritik terhadap filsafat politik hendak menunjukkan bukti-bukti ketidakmampuan filsafat dalam menjelaskan politik yang pada dasarnya adalah kesalahpahaman di antara orang-orang yang setara:

Filsafat politik ada karena yang alamiah menghilang. [...] filsafat politik —atau politiknya para filsuf—ada karena pembagian itu ada di sana (dibuat oleh mereka —tambahan penulis), karena demokrasi menawarkan paradoks tentang yang *incommensurable* (tak terukur) dari bagian yang tidak memiliki bagian, sebagai persoalan filosofis yang tidak dapat dipecahkan.⁵⁴

53 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 81.

54 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, pp. 64-65.

MEREKA YANG DISEBUT “YANG SALAH” (*THE WRONG*) DAN *DEMOS* (*PEOPLE*)

Uraian tentang bukti-bukti kebuntuan filsafat politik dalam mengatasi skandal politik (yaitu kesetaraan aritmetis) di atas, mengantar kita pada pembahasan mengenai siapakah ‘yang salah’ dan *demos* (*people*) yang dimaksud oleh Rancière. Di dalam *Disagreement*, Rancière menyajikan bab khusus untuk menjelaskan gagasannya tentang ‘yang salah.’ Mereka adalah bagian yang tidak punya bagian dalam tatanan sosial dominan, “di antara yang berguna dan yang adil ada ‘yang salah’ yang tidak terhitung, di mana dirinya membentuk tubuh politik sebagai sebuah kebalikan (antagonis) antara bagian-bagian dari komunitas yang bukan bagian yang nyata dari tubuh sosial tersebut.”⁵⁵ Pengertian ‘yang salah’ (*the wrong*), *demos*, dan *people* adalah sama, yaitu bagian yang tidak memiliki bagian dalam tatanan sosial dominan. Rancière memberi penekanan pada konsep ‘yang salah’ dalam kaitannya dengan keberadaan yang salah sebagai sebuah kesalahan dalam tatanan sosial dominan. Sebutan ‘yang salah’ tidak untuk mengaitkan dengan istilah lawannya, yaitu ‘yang benar.’ Demikian juga penyebutan tersebut tidak dikaitkan dengan intensi moral baik dan buruk. Lalu, mengapa disebut ‘yang salah’?

Jika ditelusuri dari pemikiran Rancière ditemukan bahwa konsep tentang ‘yang salah’ terkait dengan empat hal berikut: pertama, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memerintah karena prinsip alamiah atau penguasaan pengetahuan. Atau dapat disebut juga mereka tidak memiliki peran penting dalam tatanan sosial dominan. Kriteria ini merujuk pada prinsip *arkhê* yang menentukan kualifikasi memerintah di dalam pemikiran Platon. Misalnya, mereka adalah para pengrajin yang melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis. Penanaman semangat sukarela menerima tatanan atas dasar *arkhê* ditujukan untuk membuat mereka, para pengrajin, tetap berada di tempatnya dan sibuk menjalankan urusannya sebagai pengrajin.

55 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 21.

Kedua, keberadaannya berbahaya karena akan merusak atau mengacaukan keberlangsungan tatanan sosial dominan yang eksis. Kriteria ini merujuk pada *blaberon*, sebuah istilah tua dari pemikiran Platon yang dimuat dalam dialog berjudul *Cratylus*.⁵⁶ Rancière menyebut bahwa *blaberon* adalah “apa yang menghentikan sesuatu yang tengah berlangsung.”⁵⁷ Rancière juga menyebut bahwa mereka yang disebut *blaberon* sebagai pihak yang salah (*the wrong*) yang ditentukan oleh manusia superior (*sumpheron*). Sedangkan sebaliknya, *sumpheron* tidak ditentukan oleh *blaberon*, melainkan bebas menentukan dirinya sendiri. Artinya, subyektivasi *blaberon* akan menghentikan keberlangsungan *sumpheron*.⁵⁸ Kriteria yang disebut sebagai *blaberon* menurut Rancière muncul kembali dan bahkan diagungkan dalam sistem demokrasi konsensus saat ini yang mendasarkan pada dominasi opini dan jajak pendapat yang dijustifikasi para pakar.

Ketiga, tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Kriteria ini merujuk pada analisa Rancière terhadap pemikiran Aristoteles, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan bicara untuk mengungkapkan apa yang berasal dari pikirannya sendiri. Mereka hanya mengeluarkan suara (*phone*) untuk menandakan rasa senang atau sakit. Mereka bisa memahami perintah dan mematuhiinya, namun mereka tidak bisa menentukan perintah untuk dirinya sendiri. Rancière memberi contoh, “budak adalah seseorang yang terlibat dalam berpikir sejauh untuk mengenalinya (saja) tetapi tidak memilikinya.”⁵⁹

Keempat, belum ada dalam menu tatanan sosial dominan. Kriteria ini merujuk pada pemikiran Rancière tentang tindakan politik *demos* untuk memverifikasi kesetaraan dalam tatanan sosial dominan. Kemunculan *demos* menjadi suplemen di dalam tatanan sosial dominan di mana sebelumnya ia tidak ada dalam menu tatanan tersebut. Kemunculannya

56 Plato, *Cratylus*. Terj. W.R.M. Lamb, M.A., London & Masschusette: William Heinemann LTD, Harvard University Press, 1970.

57 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 107

58 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, pp. 4, 6, 107

59 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 17.

melalui perselisihan antara logika politik dan logika tatanan sosial dominan (membagi-bagi) sehingga *demos* menjadi terlihat. Menurut Rancière, yang paling penting dalam politik, misalnya dalam sebuah demonstrasi, adalah bukan pada perubahan kebijakan yang dihasilkan-nya, namun bagaimana *demos* menjadi terlihat.⁶⁰

Konsep 'yang salah' tidak merujuk pada identitas kesatuan atau kelompok masyarakat tertentu, namun merujuk pada bagian yang tidak punya bagian dalam tatanan sosial dominan.⁶¹ 'Yang salah' juga bukan kumpulan dari beragam identitas. Apabila Rancière sering menyebut identitas tertentu, seperti proletar, buruh, perempuan, atau para imigran yang tidak punya surat legal di suatu negara, maka hal tersebut merupakan cara untuk menunjukkan bahwa 'yang salah' ada sebagai bagian dari masyarakat.⁶² Walaupun contoh-contoh 'yang salah' beragam, namun menurut Rancière 'yang salah' bersifat *singular*⁶³ artinya mereka tidak diidentifikasi oleh kotak-kotak identitas tertentu seperti kelompok etnis, penganut kepercayaan, kaya, miskin, buruh, perempuan, dll. Pengotakan membuat konsep 'yang salah' jatuh pada tatanan sosial dominan, apa yang disebut Rancière sebagai *police*.

Dengan demikian, apakah keseluruhan yang disebut 'yang salah' adalah politis? Rancière secara tegas menjawab tidak. Menurut Rancière, "jika semua hal adalah politik maka tidak ada politik."⁶⁴ Tidak semua 'yang salah' harus politis, "yang salah' menjadi politis ketika ia menemukan dasar tindakan politis, yaitu kontingensi kesetaraan."⁶⁵ Ringkasnya, yang disebut 'yang salah' yang bersifat politis adalah hanya mereka yang bertindak untuk menemukan kesetaraan dirinya di antara tatanan sosial dominan dengan menentang segala bentuk kualifikasi untuk

60 Wawancara Jacques Rancière oleh Mikkel Bolt, "Hatred of Democracy." <https://www.youtube.com/watch?v=ELUQ9bgRzZk>. Diakses 18 Juli 2016.

61 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 38.

62 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, pp. 38-39.

63 Jacques Rancière, *Dissensus on Politics and Aesthetics*, p. 85.

64 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 32.

65 Jacques Rancière, "The Thinking of Dissensus, Politics and Aesthetics," p. 4.

memerintah berdasarkan prinsip utama atau *arkhê* apapun (keturunan, senioritas, penguasaan pengetahuan, agama, identitas, dll). Rancière menyebut mereka *demos*, yaitu “orang-orang yang disebut sebagai suplemen ke dalam bagian-bagian dari komunitas —apa yang saya sebut yang dihitung dari yang tak terhitung.”⁶⁶ *Demos* dianggap tidak memiliki kelayakan apapun untuk memerintah. Ia terlihat, menjadi suplemen dalam tatanan sosial dominan, melalui proses “verifikasi kesetaraan”⁶⁷ yang merupakan bentuk perselisihan (*dissensus*). *Demos* menentang empat kriteria tentang ‘yang salah’ yang lahir dari persepsi indrawi tentang tatanan sosial dominan yang terbagi-bagi.

Lalu, apakah kelompok-kelompok intoleran yang memaksakan kekuasaan agama atau yang memaksakan kepemimpinan dipegang oleh darah murni ke dalam tatanan sosial dominan yang eksis juga disebut ‘yang salah’ atau *demos*? Rancière menyadari bahwa gagasannya tentang konsep ‘yang salah’ (lihat empat kriteria di atas) dan politik sebagai sebuah perselisihan, bisa menimbulkan penafsiran seperti itu. Ia menegaskan bahwa ia menentang segala bentuk kelayakan memerintah yang didasarkan pada bentuk *arkhê* apapun.⁶⁸ Dengan demikian, kelompok-kelompok intoleran yang mendesak kepemimpinan dan tatanan sosial atas dasar agama atau etnis tertentu, adalah bagian dari yang disebut ‘yang salah’ namun mereka bukan yang politis. Mereka bukan *demos*.

Dengan pengertian *demos* yang bertindak dengan mengandaikan dan bertitik tolak pada kesetaraan aritmatik, bagaimana seharusnya memperlakukan mereka? Rancière menjawabnya dalam *Who is the Rights of Man* yang dimuat dalam *Dissensus: on Politics and Aesthetics*. Di dalam tulisan tersebut, Rancière membedakan dirinya dari pandangan dan perlakuan terhadap ‘yang salah’ yang dilihat sebagai pihak yang perlu dibantu, dikuatkan, dibebaskan, diceraikan, ‘yang lain’ (*the other*) yang tak terbatas atau ‘mutlak Yang Lain’ (*absolut Other*). Semua pengertian yang terkandung dalam terminologi tersebut menunjukkan adanya

66 Jacques Rancière, “The Thinking of Dissensus, Politics and Aesthetics,” p. 5.

67 Jacques Rancière, “The Thinking of Dissensus, Politics and Aesthetics,” p. 5.

68 Jacques Rancière, “The Thinking of Dissensus, Politics and Aesthetics,” p. 5.

hubungan yang tidak setara antara dua pihak, ada yang superior dan inferior. Berangkat dari cara pandang tersebut, konsep hak asasi manusia pun ia perdebatkan. Ia menyinggung tentang rezim konsensus yang mengerutkan (*shrinkage*)⁶⁹ ruang politis. Menurutnya ada kesenjangan antara ketentuan tentang hak asasi manusia yang abstrak dan perselisihan dalam memverifikasinya. Pengerutan ruang politis yang terjadi saat ini membuat hak asasi tersebut tidak muncul, bahkan tidak kita gunakan lagi. Ini tentunya sebuah pernyataan yang dapat menimbulkan perdebatan keras.

Namun ia berargumen bahwa ketika hak asasi manusia menjadi sebuah ketentuan, maka jika hak tersebut tidak digunakan atau tidak diverifikasi atau dipertanyakan keberadaannya, orang-orang atau kelompok yang memberikan pemenuhan hak tersebut kepada pihak lain yang dianggap memiliki hak, adalah seperti halnya orang yang dermawan (*charitable persons*).⁷⁰ Perlakuan kepada 'yang salah' oleh mereka yang memiliki bagian dalam tatanan sosial merupakan bentuk amal kasih, bukan bertitik tolak pada kesetaraan. Menurut Rancière, pemenuhan hak asasi manusia selanjutnya menjadi proyek-proyek kemanusiaan seperti pemberian baju bekas, obat-obatan, selimut kepada para korban bencana alam. Dengan kata lain, pemberian tersebut berangkat dari cara pandang membantu korban atau menjadikan 'yang lain' pada posisi korban (*victim*).⁷¹ Korban seolah-olah diberi hak namun sebenarnya adalah amal kasih. Menurut Rancière, berdasarkan pada contoh konsep hak asasi manusia yang diterapkan selama ini, cara pandang yang bertitik tolak pada kesetaraan aritmetis sebenarnya "sangat kurang."⁷²

Pendapat Rancière tersebut tidak dapat dimaknai bahwa ia menentang keberadaan aturan formal mengenai perlindungan atau pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang ditetapkan oleh negara atau badan

69 Jacques Rancière, *Dissensus: on Politics and Aesthetics*, p. 72.

70 Jacques Rancière, *Dissensus: on Politics and Aesthetics*, p. 72.

71 Jacques Rancière, *Dissensus: on Politics and Aesthetics*, pp. 39, 74, 139-140.

72 Jacques Rancière, *Dissensus: on Politics and Aesthetics*, p. 75.

dunia. Rancière menampilkan kritik dengan berangkat dari kontingensi kesetaraan aritmatik guna merawat daya kritis kita untuk tidak menerima begitu saja atau pasif menyikapi konsep-konsep atau aturan-aturan mengenai hak asasi manusia. Ketika kita mengagungkan aturan-aturan tersebut maka ada kemungkinan tergelincir menjadikannya sebagai *arkhê* baru yang totaliter dan tertutup pada dialog bagi kemungkinan aneka kemunculan subyek-subyek baru. Dengan kata lain sebuah aturan tidak mungkin dapat mentotalkan seluruh keragaman dan kemungkinan kemunculan 'yang salah.' Menurutnya 'yang salah' tidak dapat diatur melalui aturan legal formal dalam arti kompromi dengan bagian-bagian yang eksis di dalam tatanan sosial karena konsep 'yang salah' adalah ia bagian yang tidak terhitung dalam tatanan sosial tersebut. Namun bukan berarti kemunculannya tidak dapat diproses. Menurut Rancière, kemunculan 'yang salah' dapat diproses melalui mekanisme subyektivasi.⁷³ Proses ini berkaitan dengan apa yang disebut politik.

Politik adalah tentang subyek atau, lebih tepatnya, cara-cara subyektivasi. Melalui subyektivasi, maksud saya adalah sebuah produksi melalui serangkaian tindakan oleh kesatuan dan kemampuan untuk menyatakan yang sebelumnya tidak teridentifikasi di antara tatanan yang terberi, di mana identifikasi tersebut merupakan kerja bagian dari rekonfigurasi tatanan tersebut. Pernyataan Descartes *ego sum, ego existo* adalah gambaran kecil tentang keberadaan subyek-subyek yang terus terjadi yang berdampak pada pembentukan tatanan-tatanan baru. Segala bentuk subyektivasi politik berpegang pada formula ini, yaitu sebuah *nos sumus, nos existimus*.⁷⁴

Subyektivasi dilakukan oleh individu-individu atau jaringan individu yang telah mengemansipasi diri. Dalam hal ini, emansipasi adalah bentuk kesadaran seseorang bahwa ia memiliki akal budi yang kemampuannya setara dengan orang-orang lainnya. Emansipasi bukanlah sebuah tujuan akhir (*goal*) dari rangkaian tindakan politik, melainkan sebuah titik tolak,⁷⁵ yaitu titik tolak untuk memverifikasi kesetaraan akal

73 Jacques Rancière, *Dissensus: on Politics and Aesthetics*, p. 39.

74 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 35.

75 Jacques Rancière, *Moments Politiques*, p. 190.

budi. Kesadaran emansipasi konstitutif pada *demos* dalam mentransformasi logika kesetaraan menjadi logika politik⁷⁶ yaitu tindakan untuk memverifikasi kesetaraan atau menemukan kesetaraan dirinya dalam tatanan sosial dominan. Emansipasi bukanlah kesadaran yang dilakukan oleh pihak lain karena jika demikian maka hubungan antara pihak yang disadarkan dan yang menyadarkan adalah hirarkis, yaitu inferior dan superior atau antara yang tidak tahu dan yang lebih tahu.

Emansipasi terjadi pada individu dan bukan kelompok atau komunitas. Individu-individu yang teremansipasi dapat berkumpul mempertontonkan kemampuannya dalam rangka upaya belajar dari diri mereka sendiri. Ini adalah sebuah kekuatan kolektif dari orang-orang yang teremansipasi. Rancière menarasikannya sebagai “komunisme akal budi” (*communism of intelligence*) yang merupakan dampak dari emansipasi, sebuah kemampuan dari akal budi individu untuk berkelompok dengan orang-orang yang juga teremansipasi. Namun pengertian berkelompok tersebut bukan peristiwa gravitasi sosial seperti yang terjadi pada gravitasi fisika di alam yang bersifat tetap.⁷⁷ Ia selalu bersifat temporal. Kemampuan tersebut tidak menjadi satu dan menetap di dalam diri individu. Rancière menyatakan bahwa, “kemampuan komunis tidak dapat diprivatisasi. Ia tidak dapat ditransformasi menjadi kebajikan pribadi di dalam diri seorang komunis.” [...] Temporalitas emansipasi membuatnya—kekuatan kolektif akal budi—tidak dapat menjadi bagian integral yang menetap di komunitas yang terorganisasi, yang memberi setiap orang tempat dan fungsi.”⁷⁸ Menurut Rancière, emansipasi individu selalu tentang diri sebagai bagian dari individu yang lain. Emansipasi tidak pernah terjadi pada diri untuk diri sendiri yang tunggal, melainkan diri bersama yang lain. “Logika emansipasi adalah heterologi.”⁷⁹

76 Jacques Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 35.

77 Jacques Rancière, *Moments Politiques*, pp. 191-192. Emansipasi adalah sebuah tindakan individu yang dapat ditransmisikan ke individu-individu lainnya. Namun hal tersebut total berlawanan dengan logika kesatuan-kesatuan sosial atau logika agregat yang diatur oleh gravitasi sosial seperti analogi gravitasi fisika di alam.

78 Jacques Rancière, *Moments Politiques*, p. 192. Lih. *Disagreement: Politics and Philosophy*, p. 34.

79 Jacques Rancière, “Politics, Identification, and Subjectivization” *The Identity in Question* 61 (October 1992): 59.

Kemampuan emansipasi diri ditentukan oleh kekuatan kehendak, perhatian, insting, dan kebutuhan.⁸⁰ Rancière memberikan perhatian khusus mengenai kehendak. Ia meminjam konsep kehendak dari Joseph Jacotot dalam pendidikan. "Kehendak adalah kekuatan yang harus digerakkan, untuk bertindak dengan gerakannya sendiri, sebelum menjadi pilihan yang instan. [...] manusia adalah kehendak yang dilayani akal budi. Kehendak adalah kekuatan rasional yang dihasilkan dari pertentangan antara yang *idea-ist* dan yang *thing-ist*."⁸¹ Kekuatan kehendak ditentukan oleh kehendak itu sendiri. Manusia yang rasional adalah manusia yang tahu kekuatan kehendaknya dan tidak membohongi diri sendiri bahwa ia memiliki kekuatan itu. Menurut Rancière, "prinsip kejujuran adalah jantung pengalaman emansipasi."⁸² Kejujuran untuk selalu mencari kebenaran di mana kebenaran memiliki hubungan erat secara pribadi pada setiap orang. Kebenaran⁸³ dapat ditemukan selama seseorang tidak malas untuk mencarinya, selama ia selalu dalam orbit untuk mencari dan menemukannya. Misalnya, pernyataan 'saya tidak bisa' bukanlah berarti bahwa seseorang itu bodoh, melainkan ia malas, ia tidak jujur pada dirinya sendiri bahwa ia malas. Kejujuran adalah "landasan moral dari kekuatan untuk mengetahui."⁸⁴ Rancière mengatakan bahwa istilah penting dari catatan Platon tentang "kenalilah dirimu" (*know yourself*)⁸⁵ tidak lagi diartikan sebagai ketahuilah di mana yang baik itu berada, melainkan dimaknai sebagai "kembalilah pada dirimu sendiri, untuk apa yang kamu ketahui sebagai yang tidak mungkin salah di dalam dirimu. [...] Jadi ikutilah jalanmu."⁸⁶

80 Jacques Rancière, *The Ignorant School Master*, p. 51.

81 Jacques Rancière, *The Ignorant School Master*, p. 54.

82 Jacques Rancière, *The Ignorant School Master*, p. 57.

83 Jacques Rancière tidak menjelaskan secara tegas tentang apa yang disebut kebenaran. Ia menyebut bahwa kebenaran adalah sesuatu yang ada di luar diri kita, independen dari diri kita. Namun demikian kebenaran dapat dikenali, dapat diidentifikasi. Rancière, *The Ignorant School Master*, p. 58.

84 Jacques Rancière, *The Ignorant School Master*, p. 57

85 Jacques Rancière, *The Ignorant School Master*, p. 57.

86 Jacques Rancière, *The Ignorant School Master*, p. 57.

REFLEKSI: DEMOKRASI RADIKAL JACQUES RANCIÈRE

Rancière mendapat julukan atau dituduh sebagai pemikir anarkis. Ia mengamini tuduhan itu dengan argumen bahwa pemikirannya adalah anarkis sepanjang ditujukan pada urusan memerintah yang tidak didasarkan pada bentuk *arkhê* apapun.⁸⁷ Ide kesetaraan sebagai ketiadaan *arkhê* dan kontingen dalam tatanan sosial dominan adalah tawaran Rancière untuk mengatasi kebuntuan filsafat yang merumuskan praktik kesetaraan berdasarkan pada landasan tertentu. Pencarian keharusan adanya dasar atau landasan bagi tindakan politik menurutnya tidak lain adalah “membangun *arkhê* dari *arkhê*, atau kewenangan dari kewenangan.” Ia menegaskan bahwa dirinya menolak ontologisasi kebuntuan tersebut yang meletakkan kesetaraan sebagai landasan atau *arkhê* bagi tindakan politik. Ia menempatkan “kesetaraan sebagai pengandaian yang harus diverifikasi terus menerus—verifikasi atau penemuan yang membuka arena-arena khusus tentang kesetaraan. Arena-arena tersebut dibangun dengan menerobos batasan-batasan dan bentuk-bentuk kesalingterhubungan dan tingkatan-tingkatan diskursus dan wilayah pengalaman.”⁸⁸

Pemikiran Rancière sering ditafsir terlalu ‘kiri.’ Pemikirannya tentang politik sebagai perselisihan, ruang terjadinya politik yang berupa pertentangan antara logika tatanan sosial dominan dan logika politik, konsep tentang ‘yang salah,’ *demos* sebagai suplemen, dan kesetaraan sebagai pengandaian, menjadi amunisi bagi gerakan kiri. Saul Newman menilai bahwa Rancière melihat konsep kesetaraan sebagai “syarat ontologis dari setiap tatanan sosial.”⁸⁹ Jodi Dean mengkritik Rancière bahwa jika politik hanya sekedar membuat kita (*demos*) menjadi terlihat maka “kita tidak secara nyata mengambil resiko politik.”⁹⁰ Sementara itu Todd May

87 Jacques Rancière, “Against an Ebbing Tide: an Interview with Jacques Rancière.” Terj. Richard Stamp, London & New York: Continuum International Publishing Group, 2011, p. 238.

88 Jacques Rancière, “The Thinking of Dissensus, Politics and Aesthetics,” in *Reading Rancière*, p. 15.

89 Newman, *Anarchism, Poststructuralism and the Future of Radical Politics*, p. 11.

90 Jodi Dean, “Politics without Politics,” in *Reading Rancière*, pp. 93-94

berusaha menggunakan pemikiran Rancière untuk merumuskan alternatif baru tentang gerakan demokrasi *à la* Rancière untuk dapat dilembagakan.⁹¹ Namun demikian, May dikritik oleh Samuel A. Chambers⁹² yang menilai penafsiran pemikiran Rancière dari sudut pandang anarkisme. Menurutnya, May cenderung menempatkan bagian yang tidak memiliki bagian sebagai mereka yang disingkirkan dari tatanan sosial dominan. Kasus-kasus seperti perjuangan para pengungsi Aljazair di Kanada untuk memperoleh perlakuan yang setara dengan warga negara oleh pemerintah Kanada, mentotalkan negara dan menganggap negara sebagai tatanan yang represif. Menurut Chambers, May luput untuk memasukkan pemikiran Rancière bahwa politik terjadi di dalam hubungan dengan bagian-bagian yang eksis di dalam tatanan sosial. Bahwa perlawanan *demos* melalui tindakan politik adalah perlawanan yang selalu menghasilkan transformasi tatanan *police*. Perubahan tatanan sosial karena kemunculan *demos* sebagai suplemen tidak mengubah total seluruh tatanan tersebut. Perubahan tersebut bukan revolusi.

Rancière sendiri mengakui dirinya berbeda dengan para pemikir radikal lainnya. Ia mengatakan bahwa, "saya menekankan bahwa bagian yang dimainkan oleh semua inskripsi dalam proses demokrasi di dalam teks-teks konstitusi, lembaga-lembaga negara, aparatus opini publik, bentuk-bentuk mainstream dari publikasi-publikasi, dll."⁹³ Demokrasi bukanlah sebuah bentuk pemerintahan, bukan cara hidup, bukan tatanan sosial dominan. Demokrasi adalah tindakan politik yang dilakukan *demos* untuk memverifikasi atau menemukan kesetaraan dirinya di dalam tatanan sosial dominan. Politik adalah konstitutif di dalam demokrasi itu sendiri. Demokrasi bukanlah tujuan akhir, sebuah kondisi surgawi yang mengagungkan dan mempraktikkan kesetaraan pada setiap orang dan semua orang secara terus menerus. Demokrasi

91 Todd May, *Contemporary Political Movements and the Thought of Jacques Rancière*, Edinburg: Edinburg University Press, 2010, pp. 101-132.

92 Samuel A. Chambers, "The Politics of the Police: From Neoliberalism to Anarchism, and Back to Democracy." In *Reading Rancière*, pp. 18-43.

93 Jacques Rancière, "The Thinking of Dissensus, Politics and Aesthetics," p. 5.

juga bukan sebuah kondisi atau peristiwa yang dijanjikan akan terjadi di masa datang. Perubahan tatanan sosial dominan yang disebabkan oleh kemunculan *demos* menjadi bagian yang terlihat dalam tatanan tersebut berupa transformasi, bukan revolusi yang menyapu bersih semua tatanan yang ada sebelumnya. Artinya demokrasi yang terjadi di dalam arena yang politis (*le politique*) adalah proses dialog terus-menerus antara *demos* dan tatanan sosial dominan.

Pemikiran Rancière mengandung pesan bahwa demokrasi adalah proses yang mengutamakan kesetaraan akal budi, proses yang tidak terburu-buru, ditemukan saat ini dan bukan janji yang baru terjadi di masa depan, dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Demokrasi terbuka luas terhadap penemuan-penemuan baru tentang subyek politik dan bentuk-bentuk kesetaraan melalui tindakan-tindakan politik *demos*. Demokrasi, kesetaraan, dan perubahan hegemoni elit dapat terjadi saat ini apabila kita berkehendak kuat untuk bersama-sama mewujudkannya. Kita perlu realistis dengan melihat kenyataan bahwa kita hidup di dalam tatanan sosial dominan, namun bukan berarti bahwa kita menyerah pada tatanan sosial itu. Kita dapat mengubah tatanan tersebut. Kita bisa mengubah hegemoni elit dan memunculkan mereka yang disebut terpinggirkan dalam tatanan sosial. Label terpinggirkan adalah bentuk penyingkiran dari tatanan sosial, bentuk pengakuan terhadap hirarki yang lahir sejak di dalam pikiran kita. Mengubah cara pandang dan tindakan politik dengan mengandaikan dan bertitik tolak pada kesetaraan adalah sebuah tantangan sekaligus ajakan agar jangan lelah untuk terus menemukan demokrasi.

Merujuk pembelaan Chambers⁹⁴ terhadap pemikiran Rancière dari tuduhan anarkisme—bahwa tidak ada satupun pengertian tentang *police* yang ditulis oleh Rancière mengandung unsur represi atau kekerasan—menegaskan bahwa di balik penolakannya terhadap pendasaran etis dalam tindakan politis tersembunyi keberpihakan Rancière terhadap semangat anti kekerasan. Ia berhati-hati agar landasan etika tidak di-

94 Samuel A. Chambers, *The Politics of the Police*, p. 24.

salahgunakan menjadi totaliter yang akan berakibat kebalikan dari semangat etis. Demokrasi mengutamakan dialog, bukan kekerasan. Di tataran praktik, penerapan pemikiran Rancière barangkali tidak mudah, namun demikian layak untuk didiskusikan dan dicoba.

DAFTAR RUJUKAN

- Aristotle. *Politics*, (translt. H. Rackham, M.A.), London: William Heinemann LTD, 1967.
- Chambers, Samuel A. "The Politics of the Police: from Neoliberalism to Anarchism, and Back in Democracy," in *Reading Rancière: Critical Dissensus*, eds. Paul Bawman and Richard Stamp, London & New York: Continuum International Publishing Group, 2011, pp. 18-43.
- Deranty, Jean-Philippe. "Jacques Rancière's Contribution to the Ethics of Recognition." *Political Theory* 31(February 2003): 136-156.
- Dean, Jodi. "Politics without Politics," in *Reading Rancière: Critical Dissensus*, eds. Paul Bawman and Richard Stamp, London & New York: Continuum International Publishing Group, 2011, pp. 7-94.
- May, Todd, *Contemporary Political Movement and the Thought of Jacques Rancière: Equality in Action*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010.
- Newman, Saul. "Anarchism, Post-structuralism and the Future of Radical Politics." *SubStance* 36 (2007): 3-19.
- Plato. *Laws* (translt. R.G. Burry, Litt.D), London & Masschusette: William Heinemann LTD, Harvard University Press, 1967.
- _____. *Cratylus*, (translt. W.R.M. Lamb, M.A.), London & Masschusette: William Heinemann LTD, Harvard University Press, 1970.
- Rancière, Jacques. *Disagreement: Politics and Philosophy*, (translt. Julie Rose), Minneapolis: the University of Minnesota Press, 1999.
- _____. *Dissensus: on Politics and Aesthetics*, (translt. Steven Corcoran), London & New York: Continuum International Publishing Group, 2010.
- _____. *The Ignorant School Master: Five Lesson in Intellectual Emancipation*, (translt. Kristin Ross), California: Stanford University Press, 1991.

- _____. Jacques. *Moments Politique*, (translt. Mary Foster), New York: Seven Stories Press, 2014.
- _____. *Politics of Perception*, (translt. Gabriel Rockhill), London & New York: Continuum, 2004.
- _____. *The Philosopher and His Poor*, (translt. John Drury, Corinne Oster, dan Andrew Parker), London: Duke University Press, 2004.
- _____. "The Thinking Dissensus: Politics and Aesthetics," in *Reading Rancière: Critical Dissensus*, eds. Paul Bawman and Richard Stamp, London & New York: Continuum International Publishing, 2011, pp. 138-257.
- _____. "Politics, Identification, and Subjectivization." *The Identity in Question* 61 (October, 1992): 59.
- _____. "Againts an Ebbing Tide: an Interview with Jacques Rancière," (translt. Richard Stamp), in *Reading Rancière: Critical Dissensus*, eds. oleh Paul Bawman and Richard Stamp. London & New York: Continuum International Publishing, 2011, pp. 138-257.
- _____. "Dissenting Words, A Conversation with Jacques Rancière." *Diacritics* 30.2 (2000): 113-126.
- Setyo Wibowo, A. *Xarmides Platon: Keugaharian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- Toscano, Alberto. "Anti-Sociology and Its Limits," in *Reading Rancière: Critical Dissensus*, eds. oleh Paul Bawman and Richard Stamp. London & New York: Continuum International Publishing, 2011, pp. 217-237.
- Wolff, Jonathan. *An Introduction to Political Philosophy*. New York: Oxford University Press, 2009.
- Ward, Ann. "Justice as Economics in Aristotle's Nicomachean Ethics." *Canadian Political Science Review* 4 (2010)
- Youtube. "Jacques Rancière oleh Mikkel Bolt: Hatred of Democracy." Diunduh tanggal 18 Juli 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=ELUQ9bgRzZk>. Diakses 18 Juli 2016.
- Žižek, Slavoj. "The Lesson of Rancière," in Jacques Rancière, *Politics of Perception*, (translt. Gabriel Rockhill), London & New York: Continuum, 2004.